

## Disdukcapil Kota Tangerang Terbitkan 17 e-KTP untuk Transgender

**TANGERANG (IM)**- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang menerbitkan 17 KTP elektronik (e-KTP) untuk transgender sejak 2 Agustus 2021.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Tangerang, Sri Warsini mengatakan, sebenarnya ada 18 orang yang mengajukan pembuatan e-KTP transgender, sejak pihaknya mulai membuka layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi transgender pada 2 Agustus 2021. Namun, satu di antaranya baru mendapatkan akte kelahiran, belum memperoleh e-KTP. "Sesuai arahan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kami mulai memberikan pelayanan bagi transgender," kata Sri melalui sambungan telepon, Senin (23/8).

Dia menyatakan, dari 17 orang itu, kebanyakan adalah transpunan dengan usia mulai dari 20-45 ta-

hun. Mereka yang melakukan pembaharuan itu tidak mengubah nama serta jenis kelamin di e-KTP. Nama serta jenis kelamin baru dapat diubah usai para transgender memiliki keputusan pengadilan.

Syarat mengurus adminduk transpunan berbeda-beda, tergantung mereka telah memiliki data diri apa saja. Namun, syarat umumnya adalah membawa surat pengantar pembuatan e-KTP dari perangkat RT/RW. "Syaratnya beda-beda ya, kalau yang sudah punya KTP (non-elektronik), ya bawa KTP. Misal enggak punya (KTP non-elektronik), ya kami minta dia punya datanya apa, misal akte kelahiran atau KK," ujar dia.

Sri menambahkan, setiap warga bakal mendapatkan pelayanan dan hak yang sama dalam hal pendataan, perekaman, dan pencetakan adminduk. "Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan publik yang setara," imbuhnya. ● pp

DEDIE MINTA MASYARAKAT TETAP WASPADA

## Kota Bogor Melewati Masa Krisis Covid-19

**JAKARTA (IM)**- Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyebut, Kota Bogor sudah melewati masa-masa kritis dalam penanganan Covid-19. Pun demikian, ia tetap meminta agar masyarakat tetap waspada dan patuh protokol kesehatan. "Kita sudah melewati masa-masa krisis di mana kasus pasien baru melonjak tinggi dari 300 ke 600 kasus per hari, BOR kita di atas 80% dan kasus meninggal di angka belasan per hari," kata Dedie, Senin (23/8).

Meski demikian, Dedie berharap masyarakat tidak terlena dan menjadi abai terhadap protokol kesehatan (prokes). Dedie melihat kasus Covid-19, sangat fluktuatif, grafiknya turun baik dan kasus naik situasi kejadian luar biasa atau kegawatdaruratan kembali terjadi.

### BOR 27 Persen

Sementara itu, etersian tempat tidur isolasi atau bed occupancy rate (BOR) Kota Bogor di hari terakhir PPKM Level 4 di angka 27,4 persen. Berdasarkan data Satgas Covid-19, Minggu (22/8), dari jumlah ketersediaan tempat tidur atau BOR di 21 rumah sakit di Kota Bogor.

Dari 1.208 ketersediaan tempat tidur, saat ini hanya terisi 331 pasien atau hanya 27,4%. Untuk ketersediaan tempat tidur ICU, dari 65 yang disediakan hanya

terisi 41 pasien atau 63%.

Dari tiga ratusan jumlah pasien aktif yang masih dalam perawatan di rumah sakit, pasien berasal dari Kota Bogor sebanyak 194 orang (58%), Kabupaten Bogor 87 orang (26%), dan 50 pasien (15%) berasal dari luar Bogor.

Untuk ketersediaan tempat tidur di pusat isolasi BPKP Ciauwi dengan kapasitas 100 tempat tidur hanya terisi 5 pasien (5%) dari pusat isolasi Asrama IPB tersedia 184 tempat tidur, terisi 13 pasien (7%). Kadinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno berkurangnya persentase ketersediaan tempat tidur isolasi dikarenakan semakin banyaknya pasien aktif yang sembuh. "Rata-rata sudah banyak yang sembuh, sehingga angka BOR kita turun di bawah standar batas WHO 60%," paparnya, Senin (23/8).

Angka itu, kata Retno, jauh dibandingkan angka BOR pada awal PPKM Level 4 dengan BOR di atas 84 persen dan ICU penuh.

Sementara, terjadi peningkatan kasus pasien sembuh dengan rata-rata 200 kasus per hari. Minggu kemarin dilaporkan penambahan 283 kasus sembuh. Dengan demikian akumulasi kasus sembuh Kota Bogor sebanyak 34.226 atau bertambah 695 kasus dari angka pekan lalu 34.921 kasus. ● gio



IDN/ANTARA

### AKTIVITAS SEKOLAH TERDAMPAK BANJIR ROB

Seorang guru melihat bekas banjir rob di dalam ruang kelas SDN Eretan Wetan 2, Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat, Senin (23/8). Banjir rob yang sering melanda daerah itu membuat aktivitas belajar di sekolah tersebut terganggu.

## Perdagangan Online Topang Solusi Bertahan Para Pelaku IKM

**BANDUNG (IM)**- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung mengklaim, industri kecil menengah (IKM) tak ada yang gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Sebab, rata-rata IKM di Kabupaten Bandung banyak memanfaatkan sistem perdagangan online.

Kepala Bidang Industri Agro dan Kemasan Disperindag Kabupaten Bandung, Maya Kusuma Dewi mengatakan, meski pada 2021 ini masih pandemi dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih diberlakukan namun IKM di Kabupaten Bandung tidak ada yang gulung tukar. "Kalau tahun lalu kan mereka kaget, baru pertama kali mengalami pandemi. Nah, sekarang mereka sudah terbiasa karena yang sudah terdada, seperti IKM minuman, makanan, kopi, kita selalu tanya kondisinya," kata Maya melalui ponselnya, Senin (23/8).

Dia menyebutkan, salah satu dampak adanya pandemi yaitu berkurangnya kapasitas produksi karena pesanan dari konsumen menurun. Meski demikian, lanjut Maya, hal tersebut tidak sampai menimbulkan pengurangan tenaga kerja. "Kalau yang menjadi binan kami kan hanya pelaku industri yang kecil. Mereka kerjanya di dalam sistem keluarga, jadi hanya satu dan dua orang pegawai jadi enggak ada pengurangan yang

besaran-besaran," ujarnya.

Salah satu cara agar IKM bisa bertahan di tengah kondisi pandemi Covid-19 adalah dengan memanfaatkan sistem online untuk proses penjualannya. Semisal melalui media sosial, marketplace, dan aplikasi pesan singkat. "Dari pengalaman tahun sebelumnya, penjualan mereka sudah mulai ke online, memanfaatkan whatsapp dan instagram," ujarnya.

Terkait dengan kegiatan pelatihan yang biasanya rutin diikuti pelaku IKM, lanjut Maya, masih tersedia namun untuk pelaksanaannya ditunda untuk sementara waktu. Selain itu, karena saat ini sedang diberlakukan PPKM, maka kegiatan monitoring terhadap IKM Kabupaten Bandung dilakukan secara online. "Kalau pelayanan yang memang bisa online seperti kemas atau mereka memerlukan konsultasi dan lain-lain, kita masih menerima. Cuma kalau misalnya harus tatap muka langsung itu enggak," katanya.

Terkait dengan fasilitas bantuan, Maya menjelaskan, jika pelaku IKM bisa mendapatkan bantuan modal itu melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung.

"Kalau kami paling hanya bantuan alat, itu harus mengajukan lewat proposal, dan salah satu syaratnya harus berbadan hukum yang dikeluarkan Kemendagri," ujarnya. ● pur

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

### PENGETATAN PPKM LEVEL 4 DI JAMBI

Tim gabungan memeriksa kelengkapan persyaratan perjalanan pengendara roda dua di pintu masuk Kota Jambi, Jalan Lintas Sumatera, Kota Baru, Jambi, Senin (23/8). Pemerintah Kota Jambi melakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 mulai 23-29 Agustus 2021 dengan mendirikan pos pengekatan di 24 titik pintu masuk menuju kota itu dan memberlakukan sejumlah syarat perjalanan domestik di antaranya kartu vaksin dan hasil negatif tes cepat antigen COVID-19.

## Dampak PPKM, Jabar Hilang Pendapatan Rp20 M per Hari

Kebijakan PPKM dinilai telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi, terlebih pandemi Covid-19 ini penyelesaiannya efektif dilakukan dengan memutus aktivitas sosial. "Padahal banyak aktivitas ekonomi yang membutuhkan aktivitas interaksi sosial secara langsung," kata Ridwan Kamil.

**BANDUNG (IM)**- Gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil atau Kang Emil menuturkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 membuat Provinsi Jawa Barat kehilangan potensi pendapatan

daerah sekitar Rp20 miliar per hari.

"Perencanaan PPKM satu hari di level 4, Jawa Barat kehilangan (pendapatan) Rp20 miliar per hari. Jadi kami juga sangat kesusahannya kira-kira begitu," kata Ridwan Kamil

saat memberikan sambutan pada acara Kick Off West Java Economic Society 2021 dan Road to Kongres ISEI XXI secara daring, di Bandung, Senin (23/8).

Kang Emil berharap acara West Java Economic Society 2021 dan Road to Kongres ISEI XXI tersebut bisa memberikan rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.

"Saya mohon ada rekomendasi dari acara ini yakni yang pertama peningkatan daya beli masyarakat dan government standing. (Pendapatan daerah yang hilang akibat PPKM) kami hilang Rp5 triliun. Sehingga banyak kegiatan yang kami berhentikan," kata dia.

Namun, kata Kang Emil, ada sejumlah kabar baik yang berhasil dicapai oleh Provinsi

Jawa Barat dari sisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 seperti pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 mencapai 6,13 persen.

"Dan itu melompat dari dulunya minus 4 persen di periode yang sama," kata dia.

Kabar baik lainnya, investasi yang datang ke Jawa Barat selalu menempati peringkat nomor satu nasional.

"Kalau tidak salah kurang lebih Rp70 triliun investasi ke kita (Jabar). Kemudian juga ekspor sampai akhir semester ini, kita (Jabar) bisa menyumbang tertinggi sekitar 15,6 persen," kata dia.

Ia mengatakan dua ukuran ekonomi tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi Provinsi Jawa Barat di dalam suasana pandemi Covid-19.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam perspektif ekonomi saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan hal tersebut berhubungan erat dengan pengendalian pandemi Covid-19 di Jawa Barat yang sudah bisa terkendali dengan baik.

"Alhamdulillah ekonomi, keretanya sudah mulai bergerak lebih cepat lagi setelah selama PPKM sempat terhenti," kata dia.

Dia menuturkan kebijakan PPKM dinilai telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi, terlebih pandemi Covid-19 ini penyelesaiannya efektif dilakukan dengan memutus aktivitas sosial. "Padahal banyak aktivitas ekonomi yang membutuhkan aktivitas interaksi sosial secara langsung," kata dia. ● pur

## 17 Ribu Pekerja Mal Dirumahkan, Berharap Mal Segera Dibuka

**BOGOR (IM)**- Sedikitnya 17 ribu pekerja pusat perbelanjaan/mal, mengganggu karena dirumahkan sampai batas yang belum ditetapkan.

Seperti diketahui, pusat perbelanjaan di kawasan tersebut ditutup total sejak pemberlakuan PPKM sampai level 4. Satgas Covid-19 Kota Bogor segera menyampaikan data tersebut kepada pemerintah pusat agar mal kembali beroperasi dan kembali menyerap tenaga kerja yang selama ini kehilangan mata pencaharian. Wali Kota Bogor, Bima

Arya mengatakan, walau mal belum buka seperti kota lain, namun, semua pusat perbelanjaan di Kota Bogor harus siap menjalankan protokol kesehatan ketat.

Bima menilai, mal di Kota Bogor belum bisa dibuka karena ada metode penghitungan indikator dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satunya adalah tingkat keterisian tempat tidur dan tren kasus harian positif. Dan Kota Hujan lanjut Bima, belum dapat memenuhi indikator tersebut. Ditegaskan Politisi PAN itu, seharusnya pemerintah daerah diberikan kewenangan

mengurus terkait penanganan seperti ekonomi.

"Dalam rapat evaluasi satgas akan kami sampaikan data dan penanganan di Kota Bogor, termasuk kesiapan mal beroperasi," ungkapnya, Minggu (22/8).

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Ganjar Gunawan menjelaskan bahwa berdasarkan data, setidaknya ada 17.000-18.000 pekerja yang bekerja di pusat perbelanjaan.

"Hampir dua bulan lebih mal tidak buka, banyak pekerja yang terdampak. Kami berharap

mal bisa segera dibuka secara bertahap, sehingga ada perbaikan kondisi ekonomi," katanya.

Ia merinci, di Botani Square saja ada 1.600 pekerja dan di mal BTM ada 4.000 pekerja. "Jadi itu alasan penting perlu ada relaksasi," katanya. Terpisah, Ketua DPC Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Bogor-Depok, Herman mengabarkan, asiasinya memiliki 18 anggota, 7 di antaranya di Kota Bogor, 4 di Kabupaten Bogor dan 7 di Kota Depok.

Dia memastikan, bahwa 7 pusat belanja anggota APPBI di Kota Bogor siap untuk melaku-

kan pembukaan. "Nanti, panduannya seperti apa dan lain-lain. Kita berharap semua taat untuk bisa mematuhi ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah," ungkapnya.

Salah satu ketentuannya adalah setiap pengunjung diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindung sebelum memasuki mal tersebut. Sampai dengan saat ini sistem ini terus dibenahi dan disempurnakan, di mana dalam sistem itu sudah diatur kapasitas mall, termasuk pembatasan 50 persen. ● gio

## Dika dan Ula Berprestasi di Paskibra, Ade Yasin Berikan Beasiswa Panca Karsa

**CIBINONG (IM)**- Bupati Bogor, Ade Yasin memberikan beasiswa panca karsa kepada Dika Ambya Rahman dan Ula Nisya, karena berprestasi yaitu menjadi personel Paskibra tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat.

"Selain memberikan apresiasi atas prestasinya, Pemkab Bogor pada hari ini juga memberikan beasiswa panca karsa yang akan menjadi bekal saat mereka melanjutkan ke perguruan tinggi kepada Dika Ambya Rahman dan Ula Nisya," ucap Ade Yasin saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (23/8).

Mantan advokat ini menerangkan bahwa beasiswa panca karsa ini diberikan kepada SMAN 1 Cijeruk dan SMAN 1 Klapanunggal tersebut, dari mulai kuliah hingga saat mereka wisuda. "Beasiswa panca

karsa ini akan tetap kami berikan kepada mereka, walaupun mereka lulus akademi kepolisian seperti cita-citanya hingga tidak menempuh kuliah di perguruan tinggi. Semoga beasiswa ini bisa bermanfaat," terangnya.

Ade berharap prestasi yang diraih Dika Ambya Rahman dan Ula Nisya bisa ditiru oleh remaja lainnya, di Bumi Tegar Beriman baik itu prestasi di akademik maupun non akademik.

"Pemkab Bogor siap memberikan beasiswa panca karsa kepada remaja-remaja yang berprestasi seperti Dika dan Ula, semoga prestasi ini bisa diikuti remaja lainnya di Bumi Tegar Beriman," harap Ade.

**Hadiah BPR Parungpanjang** BPR Parungpanjang Kabupaten Bogor juga memberikan hadiah kepada Dika Am-

bya Rahman dan Ula Nisya.

"Hari ini, BPR Parungpanjang memberikan penghargaan atas raih prestasi Dika Ambya Rahman dan Ula Nisya. Penghargaan tersebut berupa tabung anak sekolah," ungkap Direktur Utama BPR Parungpanjang, Asep Dadan Suryadharna kepada wartawan, Senin (23/8).

Dia pun mengimbau agar remaja di Bumi Tegar Beriman lainnya untuk mengejar prestasi setinggi mungkin dan dapat ikut mengharumkan nama baik Kabupaten Bogor.

"Raihlah keberhasilan atau prestasi setinggi mungkin hingga mengharumkan nama baik Kabupaten Bogor. BPR Parungpanjang mengucapkan terima kasih atas raih prestasi Dika dan Ula hingga sudah selayaknya kami memberikan penghargaan ini," ujarnya. ● gio



IDN/ANTARA

### PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI TASIKMALAYA

Siswa kelas III mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SDN Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (23/8). Pemerintah Kota Tasikmalaya mengizinkan sekolah belajar tatap muka tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat serta membatasi kapasitas jumlah siswa sebanyak 50 persen.

## Persiapan PTM Terbatas, Kota Bogor Kebut Vaksinasi Pelajar

**BOGOR (IM)**- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah melakukan percepatan vaksinasi massal sasaran pelajar, sebagai persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Hal itu disesuaikan dengan instruksi presiden RI Joko Widodo.

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, capaian vaksinasi terhadap pelajar atau remaja usia 12 hingga 17 tahun, baru mencapai 15,36 persen. Sasaran remaja yang akan divaksinasi yakni sebanyak 104.417 orang. Artinya, baru 16.039 di antaranya yang sudah divaksinasi.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, selain pelajar, seluruh stakeholder di bagian pendidikan juga harus sudah divaksinasi untuk bisa melaksanakan PTM terbatas. "Sesuai instruksi presiden, beliau menjanjikan PTM bisa dilaksanakan apabila seluruh stakeholder pen-

didikan sudah divaksinasi. Artinya apa? Ya 100 persen. Jadi sabar dulu," kata Dedie, kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi mengatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan dari Kemendikbudristek terkait pelaksanaan PTM terbatas di Kota Bogor.

Hanafi menuturkan, saat ini Kota Bogor masih termasuk dalam wilayah PPKM Level 4. Sedangkan satuan pendidikan yang diizinkan mengadakan PTM terbatas yakni yang berada pada wilayah PPKM Level 1-3. "Untuk Kota Bogor masih belum, yang jelas Level 1-3 baru bisa PTM. Kita tunggu dari Satgas Covid-19 saja," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Hanafi, sekolah-sekolah di Kota Bogor sudah melakukan persiapan untuk PTM, sama seperti saat pelaksanaan PTM pada akhir Mei lalu. Hanya saja, Disdik Kota Bogor masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. ● gio

## Dewan Sebut Pemkot Bogor Lamban Tuntaskan Revisi Perda RTRW

**BOGOR (IM)**- Pemkot Bogor berencana melakukan revisi peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024. Namun, hal tersebut terkendala dikarenakan Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor belum tuntas. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni menyoroti lambannya kinerja Pemkot Bogor dalam menuntaskan revisi Perda RTRW. "Saya nilai Pemkot lambat dan tidak maksimal dalam mengawal proses revisi Perda RTRW," ungkap Sri, Senin (23/8) siang.

Sri melanjutkan, Perda RTRW sudah disahkan DPRD Kota Bogor dalam rapat paripurna pada 9 Juni 2021 dan menjadi salah satu landasan penting bagi rencana Pemkot untuk melakukan Revisi RPJMD Kota Bogor 2019-2024. "Sekarang

sudah akhir Agustus, artinya sudah hampir tiga bulan sejak revisi perda RTRW dipaparkan DPRD Kota Bogor," terangnya.

Dia mengaku hingga kini Perda tersebut belum mendapatkan evaluasi dan nomor register dari gubernur. Hal itu menunjukkan ketidakseriusan Pemkot Bogor dalam mengawal proses Perda tersebut. "Saya tegaskan, Perda RTRW menjadi Perda yang sangat penting dikarenakan Pemkot harus segera menyelesaikan Rancangan Perda RPJMD Kota Bogor 2019-2024," tegasnya.

Sri membeberkan, untuk dapat menyelesaikannya butuh mengacu kepada Perda RTRW hasil revisi. Sekarang sudah akhir 2021, yang artinya tersisa 3 tahun lagi RPJMD dapat diberlakukan. Sesuai dengan Permenmendagri 86 tahun 2017 pada Pasal 342 Ayat 2 disebutkan bahwa RPJMD dapat dilakukan perubahan maksimal di sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun. ● gio